

## APBD Defisit, Pemerintah Kota Bekasi Tetap Rekrut Tenaga Kontrak



*www.mediaindonesia.com*

Meski didera defisit anggaran, Pemerintah Kota Bekasi berencana kembali merekrut pegawai berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) dalam waktu dekat. Padahal, keberadaan 9.000 TKK yang saat ini ada di lingkup Pemkot Bekasi telah menyedot Rp565 miliar untuk honor mereka, sekaligus dituding sebagai penyebab defisitnya APBD 2018 Bekasi.

“Jangan disamakan Bekasi dengan Ciamis yang penduduknya sedikit, anak sekolahnya pun sedikit. Bekasi ini penduduknya 2,7 juta, kita masih butuh ratusan guru,” ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (15/10).

Menurut Rahmat, volume kerja pemerintahan sangat tinggi. Apalagi, sekarang ada pemantauan dan monitoring (pamor) tingkat RW. Penambahan TKK mau tak mau harus dilakukan untuk mempercepat proses-proses yang ada.

Meski demikian, sambungnya, pihaknya akan berupaya mengefektifkan sumber daya yang ada. Karena itu, sistem rekrutmen tenaga kerja kontrak tidak bisa lagi sembarangan. Rekrutmen akan dilakukan dengan berbasis kemampuan dan kompetensi.

“Seleksi rekrutmen TKK berdasarkan latar belakang pendidikan dan kesehatan. Guru dan tenaga kependidikan kemarin kita tolong dua ribuan, ternyata masih kurang. Karena tahun ini ada hampir 500 guru (PNS) yang pensiun, kan berarti harus ditutupi. Jadi, kita cari orang-orang yang berpendidikan guru, kita transfer tuh, atau kita maksimalkan yang ada untuk menjadi tenaga pendidik,” tandas dia.

Di Kota Bekasi, saat ini tercatat 9.000 pegawai berstatus tenaga kerja kontrak. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pegawai TKK tahun lalu yang hanya 5.151 orang.

Drastisnya penambahan jumlah TKK itu membuat beban APBD Kota Bekasi meningkat. Untuk menggaji 9.000 TKK, pemerintah harus mengalokasikan dana sekitar Rp50 miliar-Rp60 miliar dalam satu bulan. Dalam satu tahun alokasi yang disiapkan untuk gaji tenaga kerja kontrak dalam APBD 2018 mencapai Rp565 miliar.

Akibat gembosnya APBD Kota Bekasi tersebut, Wali Kota membentuk tim penagih pajak bumi dan bangunan (PBB) di 12 kecamatan di wilayah setempat guna menagih piutang Rp439 miliar.

**Sumber Berita:**

1. Harian Media Indonesia, *APBD Gembos, Bekasi Rekrut Tenaga Kontrak Lagi*, Selasa, 16 Oktober 2018, hal. 16.

**Catatan:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. (pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara)
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)